



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT PERSIAPAN DAN KESIAPAN PEMILU SERENTAK 2024
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023 – 2024
KE KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 30 JANUARI – 1 FEBRUARI 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Januari 2024 dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait kesiapan tahapan pemilu serentak tahun 2024 dan kesiapan tahapan pilkada serentak tahun 2024. Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dipimpin oleh Drs. H. Guspari Gaus, M.Si Ketua Tim/Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN. Kunjungan kerja spesifik hari ini diikuti juga oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, dan didampingi pula oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI, yakni dari Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Bawaslu RI.

Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 semakin dekat, pada 14 Februari 2024 mendatang, seluruh daerah di Indonesia akan merayakan pesta demokrasi dengan ikut serta dalam pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode 2024-2029. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI ingin mengetahui secara langsung kesiapan penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tahapan pemilu. Saat ini pemilu serentak tahun 2024 sudah masuk pada tahapan masa kampanye dan pendistribusian logistik pemilu. Beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI antara lain : jumlah DPT Potensial Non E-KTP pemilu serentak 2024 dan ketersediaan blanko KTP-el, ketersediaan NPHD untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2024, ketersediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggara badan ad hoc pemilu se-Sumatera Barat, upaya preventif terhadap pelanggaran netralitas ASN pada masa kampanye, distribusi logistik pemilu (kotak suara, kertas suara, bilik suara), ketersediaan gudang KPU untuk penyimpanan logistik pemilu, dan komitmen seluruh penyelenggara pemilu untuk menjaga independensi dan profesionalitas. Pengawasan yang dilakukan Komisi II DPR RI sangat penting dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 berjalan sesuai dengan tahapan dengan menerapkan prinsip-prinsip jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia serta penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.

Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi menyampaikan bahwa pemilu serentak 2024 merupakan arena pendewasaan seberapa jauh demokrasi dipahami masyarakat dan nilai-nilai demokrasi dapat menjamin terjadinya perubahan secara damai, adanya pengakuan terhadap keanekaragaman, tegaknya keadilan, serta ilmu pengetahuan yang maju. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen menjaga kondusifitas pemilu dengan melakukan rapat-rapat dengan Forkopimda. Selain itu komitmen menjaga netralitas ASN dilakukan melalui pakta integritas ASN dan himbauan dalam setiap rapat dan kegiatan. Adapun pemilu damai dan bermartabat di Provinsi Sumatera Barat dikenal dengan “pemilu badunsanak” yaitu pemilu kekeluargaan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memaparkan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 254.079.435 jiwa dengan persentase 99.59% dari jumlah penduduk wajib KTP. Sisanya 0.53% adalah penduduk dengan status belum berusia 17 tahun akan tetapi sudah dilakukan perekaman, sehingga nanti pada usia 17 tahun akan diterbitkan KTP-elnya. Ketersediaan blanko KTP-el di Provinsi Sumatera Barat jumlahnya mencukupi sampai dengan pemilu dan pilkada serentak 2024. Surat keterangan pengganti identitas kependudukan (suket) belum diterbitkan karena blanko masih cukup. Selama blanko tersedia maka Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat dijalankan masyarakat (suket tidak diperlukan lagi).

Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kesehatan, kecelakaan dan kematian bagi penyelenggara badan adhoc pemilu 2024 kurang lebih dibutuhkan anggaran sebesar 3.24 milyar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah agar segera dapat mengalokasikan anggaran BPJS Ketenagakerjaan bagi penyelenggara adhoc. Selain itu, ketersediaan NPHD untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di Provinsi Sumatera Barat sudah diberikan kepada KPU Sumatera Barat sebesar 128.79 milyar, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebesar 38.25 milyar, pengamanan sebesar 7.5 milyar, dan TNI sebesar 4.69 milyar.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat memaparkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4.088.606 pemilih yang tersebar di 17.569 TPS dan 1.265 kel/desa/nagari. Terdapat penambahan dari DPT pemilu 2019 sebanyak 370.369 pemilih. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) per 15 Januari 2024 sebanyak 24.487 pemilih yang tersebar di 8.096 TPS di 19 kab/kota. Pemilih non KTP-el di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 79.404 orang.

Pengadaan logistik pemilu dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada tanggal 9 dan 12 Januari 2024. Pendistribusian dilakukan melalui kapal laut di Pelabuhan Teluk Bayur. Saat ini logistik pemilu (kotak suara, kertas, suara, bilik suara, tinta, segel, dll) telah sampai di seluruh kab/kota. Kekurangan dan kerusakan logistik pemilu hanya 0.4% dari kebutuhan logistik pemilu. Kekurangan dan kerusakan logistik pemilu akan dipenuhi oleh penyedia

paling lambat 31 Januari 2024. Pemilihan Gudang logistik pemilu telah memenuhi standar keamanan, tidak terkena banjir ataupun bencana alam lainnya.

KPU Provinsi Sumatera Barat juga telah mengidentifikasi jumlah TPS yang tidak memiliki jaringan listrik dan jaringan internet. Terdapat 547 TPS yang tidak memiliki jaringan internet dan 215 TPS yang tidak memiliki jaringan listrik. KPU Provinsi Sumatera Barat telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PLN untuk mengatasi masalah tersebut.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan kampanye pemilu serentak 2024 dengan menyampaikan surat imbauan kepada peserta pemilu perihal metode kampanye, alat peraga kampanye, netralitas ASN, dll. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Trend dugaan pelanggaran tahapan kampanye pemilu yaitu dugaan tindak pidana pemilu dan dugaan pelanggaran kode etik. Pada tahapan kampanye terdapat 21 penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang terdiri dari 18 Laporan dan 3 Temuan. Berdasarkan data tersebut 6 merupakan bukan pelanggaran, 2 tidak didaftarkan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, 1 dugaan pelanggaran Kode Etik dan 21 dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda, KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas kesiapannya dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Beberapa catatan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI pada kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen menjaga netralitas ASN melalui pakta integritas dapat pula dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat agar pemilu serentak berjalan damai dan kondusif.
2. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 tanpa terkendala persoalan administratif.
3. Terjadinya bencana alam erupsi Gunung Marapi, Komisi II DPR RI meminta KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan langkah antisipasi berupa pemetaan titik kerawanan TPS di daerah rawan bencana untuk memastikan pemilu tetap dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Komisi II DPR RI meminta KPU RI meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu sebagai langkah pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan pemilu.
5. Terhadap isu netralitas ASN di Sumatera Barat yang menempati peringkat ke-8 di seluruh Provinsi di Indonesia, Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan KASN guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku ASN dan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu meningkatkan pengawasan terhadap money politic yang rawan terjadi mendekati hari H pemungutan suara.

Kota Padang, 1 Februari 2024,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Padang.